

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana di Kabupaten Pohuwato belum berjalan secara Optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh petani tambak dan banyaknya kendala polisi hutan dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pohuwato adalah belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di bidang kehutanan, minimnya fasilitas dan kemampuan polisi kehutanan yang masih rendah.

#### **5.2. Saran**

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.

2. Perlu segera dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus di bidang kehutanan untuk memudahkan Polisi Kehutanan dalam menangani kerusakan hutan mangrove.
3. Polisi Hutan harus melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi kerusakan hutan mangrove mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat Pohuwato.
4. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah dalam menjalankan peraturan daerah no 13 tahun 2013 tentang pengelolaan ekosistem hutan mangrove karena tidak sesuai dengan pelaksanaan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

## Daftar Pustaka

### Buku

Amirudin Zainal Asikin. 2003 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Mataram: PT Raja Grafindo Persada.

Fence M.Wantu. 2011 *Idee Des Recht :Kepastian Hukum,Keadilan Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*,Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fenty U. Puluhulawa. 2013. *Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta :Interpena.

H.S., Salim. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.

Iskandar.2015.*Hukum Kehutanan(Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pegelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan)*,Bandung: CV.Mandar Maju.

Takashi Inoguchi,Edward Newman,Glen paoletto.2015 *kota dan lingkungan pendekatan baru masyarakat berwawasan ekologi*, pustaka LP3ES Indonesia.

M.Ghufran H.Kordi K. 2012 *Ekosistem Mangrove :Potensi,Fungsi,Dan Pengelolaan*,Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suratman,Dillah Philips. 2012. *metode penelitian hukum*. bandung: alfabeta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad.2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Muhammad Erwin.2015.*Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.

N.H.T.Siahaan, 2004,*Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga.

Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahrdjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.

Sunggono Bambang. 1996.*Metode Penelitian Hukum*. Jember: PT Raja Grafindo Persada.

Siti Sundari Rangkuti. 2005.*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya:Airlangga.

### **Undang-Undang**

Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan .

Undang Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.54/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Standar Dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan.

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atasundang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

**Jurnal:**

Nirwan Junus dan Fenty Puluhulawa (*Penelitian “Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo*), tahun 2014, Hal.3

Nirwan Junus Dan Fenty Puluhulawa (*Penelitian :Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo*), Tahun 2014, Hal.24

<sup>1</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat> diakses pada hari selasa tanggal 11/07/2017

Ain Madjid ,( Skripsi :*Analisis Yuridis Kebijakan Pemerintah Terhadap Alih Fungsi Kawasan Hutan Mangrove Di Kabupaten Pohuwato*),Universitas Negeri Gorontalo,2013

<https://jurnalbumi.com/hutan-mangrove/> diakses pada tanngal 22/07/2017

Fenty U Puluhulawa.,*pengawasan sebagai instrumen penegakan hukum pada pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara* , Jurnal Dinamika Hukum no.Vol.11, mei 2011

GAMBAR AREAL HUTAN MANGROVE BERALIH FUNGSI  
MENJADI TAMBAK DI KEC. DUIADAA KAB.POHUWATO



Gambar.1



Gambar.2



Gambar.3



Gambar .4



Gambar.5



Gambar.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM



Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128  
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752  
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : /UN47.B9.1/KM/2017  
Hal : Rekomendasi Izin Meneliti

29 Mei 2017

Yth. Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit III  
Kabupaten Pohuwato  
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Peran Polisi Hutan Dan Masyarakat Terhadap Kelestarian Hutan Bakau Di Kabupaten Pohuwato**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Zulkifli Daud  
NIM : 271 413 038  
Angkatan : 2013/2014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

n. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Zamroni Abdussamad, SH, MH  
NIP. 19700712 200312 1 00



**PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**UPTD KESATUAN PENGELOAAN HUTAN UNIT III POHUWATO**

Jl. Nani Wartabone Kompleks Blok Plan Perkantoran Marisa  
Telp. (0433) - Fax. (0433)-

Nomor : 522/KPH.III/1/53/VI/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi ijin Penelitian

Marisa, 1 Juni 2017

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
Di-

Gorontalo.-

Menindaklanjuti surat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 933/UN47.B9.1/KM/2017 Tanggal 29 Mei 2017 perihal Rekomendasi ijin meneliti untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul ” **Optimalisasi Peran Polisi Hutan Dan Masyarakat Terhadap Kelestrarian Hutan Bakau di Kabupaten Pohuwato** ” atas Nama Mahasiswa :

Nama : Zulkifli Daud  
Nim : 271 413 038  
Angkatan : 2013/2014  
Program studi : Ilmu Hukum  
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Pada Prinsipnya kami memberikan Rekomendasi ijin Penelitian untuk pengambilan data skripsi dimaksud.

Demikian Rekomendasi ini di buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
2. Arsip

## CURICULUM VITAE



**ZULKIFLI DAUD**, lahir di paguyaman pada tanggal 18 november 1994. Agama islam, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal desa mekar jaya kec. Duhiadaa kab. Pohuwato. Anak ke tiga dari bapak Hais Daud dan ibu Ningsih Yusuf. Menjadi mahasiswa strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo pada tahun 2013 sampai 2018.

### **PENDIDIKAN/EDUCATION**

#### **FORMAL:**

1. Sekolah dasar (SDN) mekar jaya, masuk pada tahun 2001 dan lulus tahun 2007
2. Sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 01 marisa pada tahun 2007 dan tahun lulus 2010
3. Sekolah menengah atas (SMAN) 01 marisa masuk pada tahun 2010 dan lulus tahun 2013.
4. Universitas negeri gorontalo, fakultas hukum, jurusan ilmu hukum (konsentrasi hukum pidana) masuk pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2018.

#### **Keikutsertaan Seminar/Workshop**

1. Peserta masa orientasi mahasiswa baru (MOMB) universitas negeri gorontalo tahun 2013.
2. Peserta latihan kepemimpinan mahasiswa hukum (LKMh) universitas negeri gorontalo tahun 2013.

3. Peserta pelatihan komputer dan internet yang diselenggarakan oleh pusat teknologi informasi dan komunikasi universitas negeri gorontalo tahun 2013
4. Peserta seminar nasional penegakan hukum berdasarkan pancasila tahun 2014
5. Peserta praktek kerja lapangan (PKL) di manado tahun 2015
6. Peserta seminar nasional oleh komisi yudisial ri dengan tema “penguatan kompetensi hakim dalam memutus perkara di landasi etika dan moral serta kehormatan hakim melalui komisi yudisial “ tahun 2015
7. Peserta praktek peradilan tata usaha negara (PTUN) di manado tahun 2015
8. Peserta KKN revolusi mental dan KKS pengabdian universitas negeri gorontalo di desa buntulia jaya kec. Duhiadaa kab. Pohuwato tahun 2016